STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

(Studi Kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

(Skripsi)

Oleh

JUBAISA HERIETRENGGI

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

ABSTRAK

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

(Studi Kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

Oleh:

Jubaisa Herietrenggi

Pemberdayaan masyarakat di Desa Sidomulyo melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna desa masih belum maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan fasilitas serta posyantek untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat di Desa Sidomulyo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalu pengembangan teknologi tepat guna dengan pendekatan tahap pemberdayaan masyarakat yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna belum maksimal dikarenakan upaya penyadaran yang masih kurang optimal dengan masyarakat yang masih mementingkan pembangunan infrastruktur, kegiatan yang tidak berkelanjutan dalam tahap pengkapasitasan, dan kurangnya bimbingan teknis terhadap masyarakat. Hal ini di pengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia tentang teknologi tepat guna, dan keterbatasan fasilitas teknologi tepat guna, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi yang masih kurang intens. Sehingga perlu diterapkannya teknologi dalam kegiatan, kepemimpinan yang baik, komunikasi yang mengedepankan budaya masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang baik. Saran yang dapat diberikan adalah: penambahan intensitas pelatihan bimbingan teknis bagi masyarakat dan perangkat desa, penambahan jumlah petugas desa untuk mendampingi masyarakat, dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Teknologi Tepat Guna

ABSTRACT

COMMUNITY EMPOWERMENT STRATEGY IN DEVELOPING APPROPRIATE TECHNOLOGY

(Case Study of Sidomulyo Village, Negeri Katon District, Pesawaran Regency)

By:

Jubaisa Herietrrenggi

Community empowerment in Sidomulyo Village through Appropriate Technology Development for the village is still not optimal, this is due to low human resources and limited facilities and posyantek for community empowerment activities have not fully empowered the community in Sidomulyo Village. This research aims to describe and analyze the implementation of community empowerment through the development of appropriate technology using an empowerment stage approach, namely the community awareness, capacity building and utilization stages. This research is a qualitative research. The research results show that the implementation of community empowerment through the development of appropriate technology has not been optimal due to awareness efforts that are still less than optimal with the community still prioritizing infrastructure development, unsustainable activities in the capacity building stage, and a lack of technical guidance for the community. This is influenced by the lack of human resources regarding appropriate technology, and limited appropriate technology facilities, limited number of human resources accompanying community empowerment activities and communication that is still less intense. So it is necessary to apply technology in activities, good leadership, communication that prioritizes community culture, and good community participation. Suggestions that can be given are: increasing the intensity of Technical Guidance training for the community and village officials, increasing the number of village officers to assist the community, and increasing communication with the community.

Keywords: Community Empowerment, Development of Appropriate Technology

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

(Studi Kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

Oleh

JUBAISA HERIETRENGGI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemeritahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	:	**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (Studi Kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)**
Nama Mahasiswa	:	*Jubaisa Herietrenggi*
NPM	:	**1916021068**
Jurusan	:	**Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP 198106012010121003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.** .....

   Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

   Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

   NIP 196107081987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Januari 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan

Jubaisa Herietrenggi
NPM. 1916021068

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Jubaisa Herietrenggi, dilahirkan di Andamata, Kecamatan Arguni, Kabupaten FakFak, Provinsi Papua Barat pada tanggal 14 April 1999. Penulis merupakan anak ke-tiga dari lima bersaudara, putri dari pasangan Bapak Samsuddin Herietrenggi dan Ibu Sumiati Turua. Jenjang penulis dimulai dari tahun 2006-2012 di SD Impres Andamat. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Pertama di SMP Negeri 01 Kokas tahun 2012-2015 dan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Kokas pada tahun 2015-2018. Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur Afirmasi Adik Papua dan mendapatkan Beasiswa selama Pendidikan. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2019. Selama masa perkuliahan penulis pernah menjadi anggota HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP Unila tahun 2019-2020. Penulis juga pernah menjadi anggota pengurus KOPRI PMII RAYON FISIP dan penulis juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Mahasiswa Papua Lampung (IKMAPAL). Penulis telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung pada tahun 2022. Serta telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 1 bulan di Balai UPT Bahasa Universitas Lampung.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha Penelititelah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
(Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 286)

“Petualangan terbesar yang bisa kita lakukan yaitu menjalani kehidupan yang kita impian”
(Oprah Winfrey)

"Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”
(Ridwan Kamil)

“Libatkan doa ke dua orang tua dalam setiap prosesmu”
(Jubaisa Herietrenggi)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin telah Engkau Ridhai Ya Allah Langkah hamba Mu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan

Teriring Shalawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga kelak Skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, Samsuddin Herietrenggi dan Sumiati Turua
serta kakak-kakak dan adikku yang ku sayangi. Sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku
Terima kasih doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudari seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT

Almamater Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri taulan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul " Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Semoga segala kebaikan ibu mendapatkan balasan dari Allah SWT dan kebaikan selalu tercurah untuk ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembahas Skripsi. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan juga atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya progress yang baik terhadap skripsi penulis sehingga mampumenyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan

bapak mendapatkan balasan dari Allah SWT dan kebaikan selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

3. Bapak Darmawan Purba, M.Si. Selaku Pembimbing Akademik (PA). Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan ilmu, kritik, saran,masukan serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan bapak mendapatkan balasan dari Allah SWT dan kebaikan selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
4. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas didikan, serta ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang.
5. Terima kasih kepada Pemda Kabupaten Fakfak dan Pemda Privinsi Papua Barat atas dukungan berupa material,
6. Terima kasih kepada pengurus Afirmasi Adik Papua Unila, atas support dan dukungannya.
7. Bapak Eko Maristyawan dan Bapak Dian Yudhistira, Terima kasih sudah mengizinka serta membantu peneliti dalam proses pengambilan data di Kantor Dinas PMD Kabupaten Pesawaran.
8. Bapak Mulyadi, Bapak Ahmad, Bapak Isgiyanto, dan Bapak Timan terimakasih sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Sidomulyo.
9. Kedua orang tua tercinta, papah Samsuddin Herietrenggi dan mamah Sumiati Turua, yang selalu memberikan support baik secara materil maupun non materil selama proses peneliti menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, ridho dan doanya.
10. Kakak-Kakak tersayang, Aminah Herietrenggi, S.Pd,. Sundus Herietrenggi, S.Pd. Dan Adikku M. Ali Herietrenggi,. Abuchari Herietrenggi dan Samad Herietrenggi. Terima kasih atas support, kasih sayang, dan canda tawa yang diberikan serta pengertiannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kalian sehingga kita semua mampu menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua kita.

11. Keluarga dan saudara yang sudah memberikan support dan doanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan untuk kalian semua.
12. Teman-teman IKMAPAL dan PMII Rayon FISIP Terima kasih atas waktu dan canda tawa yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun berada dan semoga kesuksesan selalu mananti untuk kalian.
13. Seniorku di kampus, Abang Tiyaz Apriza, S.I.P.,M.I.P dan Abang Robi Apriadi Harahap, S.I.P., Terimakasih atas bimbingan, motivasi, ilmu, dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
14. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus dan berproses bersama dari awal menjadi mahasiswa baru hingga sudah menjadi mahasiswa akhir seperti sekarang. Semoga kita dapat dipertemukan lagi di lain kesempatan, sukses untuk kita semua.
15. Abang Julian Basten Rumbobiar yang senantiasa membantu Peneliti ketika kesulitan mengurus administrasi dalam proses penyusunan skripsi serta diskusi -diskusi yang diberikan, terimakasih banyak atas semuanya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas semuanya.
17. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Januari 2024

Jubaisa Herietrenggi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
PERNYATAAN ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
SANWACANA ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 12
1.3 Tujuan Penelitian 12
1.4 Manfaat Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
2.1 Tinjauan Tentang Strategi 14
2.1.1 Pengertian Strategi 14
2.1.2 Jenis-jenis Strategi 16
2.1.3 Tahap-tahapan Strategi 17
2.1.4 Ruang Lingkup Strategi 18
2.2 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat 20
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 20
2.2.2 Jenis-jenis Pemberdayaan Masyarakat 25
2.2.3 Tahap-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat 26
2.2.4 Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat 27
2.3 Tinjauan Tentang Pengembangan Teknologi Tempat Guna 30
2.3.1 Pengertian Pengembanagan Teknologi Tepat Guna 30

2.3.2 Jenis-jenis Pengembanagan Teknologi Tepat Guna 32
2.3.3 Tahap-tahapan Teknologi Tepat Guna 32
2.3.4 Ruang Lingkup Teknoli Tepat Guna 37
2.4 Kerangka Pikir 39

BAB III METODE PENELITIAN 41
3.1 Tipe Penelitian 41
3.2 Lokasi Penelitian 43
3.3 Fokus Penelitian 43
3.4 Jenis Data Penelitian 44
3.5 Informan 45
3.6 Teknik Pengumpulan Data 45
3.6.1 Observasi 45
3.6.2 Wawancara 46
3.6.3 Dokumentasi 46
3.7 Teknik Pengelolaan Data 47
3.7.1 Editing Data 47
3.7.2 Interpretasi Data 47
3.8 Teknik Analisis Data 48
3.8.1 Reduksi Data 48
3.8.2 Penyajian Data 49
3.8.3 Penarikan Kesimpulan 49
3.9 Teknik Validasi Data 49

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 51
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran 51
4.2 Gambaran Umum Dinas PMD Kabupaten Pesawaran 52
4.2.1 Maksud dan Tujuan 54
4.2.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 55
4.2.3 Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan 57
4.2.4 Kelompok Jabatan Fungsional 59
4.2.5 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 60
4.3 Gambaran Umum Desa Sidomulyo 61
4.3.1 Letak dan Luas Wilayah 62
4.3.2 Iklim 63
4.3.3 Pemerintahan Desa Sidomulyo 63
4.3.4 Visi dan Misi 63

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 68
5.1 Hasil Penelitian 68
5.1.1 Tahap Penyadaran 70
5.1.2 Tahap Pengkapasitasan 82

5.1.3 Tahap Pendayagunaan 91
5.2 Pembahasan Penelitian 102
5.2.1 Tahap Penyadaran 103
5.2.2 Tahap Pengkapasitasan 109
5.2.3 Tahap Pendayagunaan 115
5.2.4 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Teknologi Tepat Guna 119

BAB VI PENUTUP 124
6.1 Simpulan 124
6.2 Saran 126

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 40
Gambar 4.1. Penelitian Terdahulu 52
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dinas PMD..... 60
Gambar 4.3. Peta Lokasi Desa Sidomulyo..... 67
Gambar 4.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidomulyo 67
Gambar 5.1. Layanan Teknologi Tepat Guna Desa Sidomulyo 91

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu 10
Tabel 3.1. Informan..... 45
Tabel 5.1. Triangulasi Data Penelitian..... 100
Tabel 5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Pesawaran..... 120

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi adalah indikator penting dalam bagian kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan masyarakat pemanfaatan teknologi sangat penting dalam menunjang efisiensi, memudahkan pekerjaan dan memberi nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Namun pada umumnya, teknologi diasumsikan pada seperangkat alat yang dapat memberi dampak buruk pada manusia dan lingkungan melalui pencemarannya. Tidak jarang pula teknologi membutuhkan modal besar dan cara pemakaian yang rumit sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menengah kebawah. Padahal dengan berkembangnya zaman masyarakat dituntut untuk menguasai teknologi dan memanfaatkannya. Indonesia yang dilimpahi sumber daya alam yang beragam harus mampu diolah menjadi produk oleh masyarakat yang tentunya pasti membutuhkan teknologi. Teknologi Tepat Guna hadir sebagai jembatan antara teknologi tradisional dan teknologi modern. Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi merupakan salah satu pilihan yang tepat agar masyarakat mampu berdaya dengan dukungan faktor teknologi.

Realitas penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi di lingkungan pemerintah dan lingkungan masyarakat banyak memberikan dampak yang positif sehingga dapat menuntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun kualitas sumber daya manusia dengan mulai meninggalkan pemerintahan tradisonal pemerintahan tradisional yang identik dengan *paper-based administration* yang menjadi pintu gerbang penerapan *electronic government* dan menjadi manifestasi akan komitmen pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan berbasis kepada pemanfaatan infrastruktuk teknologi informasi (Yunita & Aprianto dalam Yulhendri , 2020:12).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa teknologi tepat guna atau (TTG) adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dapat dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Pada beberapa wilayah di Indonesia, untuk memudahkan pemusatan pemanfaatan teknologi tepat guna , maka dibentuk (POSYANTEK) pos pelayanan teknologi tepat guna. Di Kabupaten Pesawaran, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dipusatkan di Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEKDES) yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bentuk implementasi dari PERMENDESA Nomor 23 tahun 2017. Keberadaan Posyantekdes dibeberapa desa bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Urgensi Pemanfaatan teknologi tepat guna terutama bagi masyarakat desa adalah menjadi langkah Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, menjadikan masyarakat desa mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam pedesaan.

Terkait Pengembanagn Teknologi Tepat Guna terdapat sejumlah kajian yang dapat menjadi acuan diantaranya;

Antara, G. E. D. (2015) Menjelaskan bahwa pengembangan teknologi tempat guna dengan Cara untuk memajukan industri kreativ yang ada di Bali yakni dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai mediator dan fasilitator untuk memudahkan dan menjembatani antara produsen, pelaku usaha dan konsumen. Serta peningkatan inovasi teknologi tepat guna melalui program pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya

masyarakat pedesaan yakni Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di masing-masing kecamatan, warung teknologi (Wartek) di masing-masing desa/kelurahan sebagai lembaga yang memberikan bimbingan dan pelayanan teknis kepada masyarakat dalam alih fungsi dan transfer teknologi untuk memaksimalkan produktivitas usaha masyarakat.

Laliyo, L.A. (2015). Rekayasa implementasi teknologi tepat guna melalui pengembangan model pembelajaran untuk menumbuhkan budaya pemanfaatan energi terbarukan pada masyarakat daerah terpencil. Unggulan Perguruan Tinggi *(*DP2M*)*, 2(1019). Menjelaskan bahwa pengembangan teknologi tempat guna dengan upaya pemerintah memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumberdaya energi terbaru (misalnya energi air untuk pembangkit listrik alternatif), cenderung mengalami masalah atau bahkan kegagalan dalam implementasinya; karena masyarakat tidak terlibat secara aktif dan partisipatif, juga terbatasnya wawasan dan ketrampilan. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran Teknologi Tepat Guna Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menumbuhkan budaya pemanfaatan energi terbarukan masyarakat di daerah terpencil. Tujuan ujuan khusus yang akan dicapai pada Tahun I, Tahun II dan Tahun III. Penelitian Tahun I telah dapat dihasilkan sebuah produk model pembelajaran teknologi tepat guna, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro untuk pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan budaya pemanfaatan energi terbarukan masyarakat di daerah terpencil.

Model ini telah dievaluasi oleh pakar/ahli dan teman sejawat yang kompeten dibidang teknologi pendidikan, sumberdaya energi alternatif dan sosial pedesaan; juga telah diujicoba lapangan skala kecil; dan telah mengalami perbaikan sebanyak dua kali. Diharapkan penelitian ini dapat berlanjut di tahun berikutnya. Tujuan khusus Tahun II adalah: 1) melakukan uji-coba model pembelajaran teknologi tepat guna, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro pada skala yang lebih luas; sekligus 2) mengukur hasil penerapan

model dimaksud dalam menumbuhkan budaya pemanfaatan energi terbarukan. Tujuan khusus Tahun III adalah: Diseminasi Model Pembelajaran Masyarakat tentang Rekayasa teknologi tepat guna (TTG) di Daerah terpencil lainnya. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan model pembelajaran bagi masyarakat melalui strategi pemberdayaan (*empowering*) dengan konsep *Community Based Education* (*CBE*). Prosedur penelitian terdiri atas: (1) perancangan dan analisis model yang dilakukan melalui persiapan, pembuatan dan pengembangan; (2) validasi ahli, revisi dan simulasi dilakukan untuk menilai desain model dari segi kebermanfaatan, kepraktisan dan ketepatan sasaran pembelajaran melalui *focused group discussion* (*FGD*); (3) ujicoba model melalui praktek langsung pembuatan pembangkit listrik mikrohidro oleh masyarakat; (4) mengukur hasil rekayasa teknologi tepat guna dalam menumbuhkan budaya pemanfaatan energi terbarukan dilakukan melalui respon positif masyarakat akan adanya listrik dan tumbuhnya dinamika social budaya seiring dengan meningkatnya nilai ekonomi masyarakat, dan (5) Diseminasi dilakukan melalui penerapan model di beberapa daerah bekerjasama dengan pemerintah terkait.

Laliyo, L. A. (2015). Rekayasa implementasi teknologi tepat guna melalui pengembangan model pembelajaran untuk menumbuhkan budaya pemanfaatan energi terbarukan pada masyarakat daerah terpencil. Unggulan Perguruan Tinggi *(*DP2M*)*, 2 (1019). Menjelaskan bahwa pengembangan teknologi tempat guna dengan ini bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi pemanfaatan sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan berupa biogas. Dari kegiatan ini, diharapkan masyarakat mendapatkan manfaat sosial dan ekonomis dari limbah yang dihasilkannya sendiri. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah diskusi, penyuluhan, dan eksperimen diversifikasi usaha. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih dengan memanfaatkan biogas sebagai energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, serta menambah wawasan masyarakat dalam

memanfaatkan limbah dan pola hidup yang lebih sehat khususnya untuk menjaga kelestarian alam.

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian, sambutan masyarakat sangat baik dan antusias untuk membantu terlaksananya kegiatan pengabdian. Hal ini terbukti dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi serta kesediaan warga untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini. Masalah yang dihadapi di lapangan adalah terbatasnya pengetahuan, teknologi dan peralatan produksi untuk menghasilkan kompos yang berkualitas karena belum adanya teknologi tepat guna pembuatan biogas yang dikuasai masyarakat. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan dengan pendampingan yaitu memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pelatihan.

Yanti, E. A. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan teknologi tepat Guna (TTG) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang (*Doctoral dissertation*, Universitas Sumatera Utara). Menjelaskan bahwa pengembangan teknologi tempat guna dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna merupakan salah satu upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia. Masalah yang muncul dalam program ini adalah masyarakat masih awam dengan Teknologi Tepat Guna, belum tersedianya pos-pos pelayanan yang menangani Teknologi Tepat Guna (Pos layanan teknologi tepat guna), serta belum adanya Peraturan Desa yang mengatur Progam Pemberdayaan Masyarakat khususnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program pemberdayaan melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013: 99), terdapat lima kategori implementasi kebijakan yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial,

ekonomi dan politik. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan lapangan penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah berjalan namun masih terdapat masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakannya. Saran dari peneliti adalah mensosialisasikan kembali Permendes PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa baik dari dinas kepada perangkat desa dan perangkat desa kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan Posyantek Desa dan Antar desa, memberikan pelatihan kepada pengurus Posyantek Desa dan kelompok masyarakat.

Widyasanti, A. (2016). Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Pembuatan Produk Sabun Berbasis Komoditas Lokal di Desa Sindanglaya dan Desa Mekar Wangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis. Dharmakarya, 5(1). Menjelaskan bahwa pengembanagan teknologi tempat guna dengan Upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu secara mandiri memanfaatkan potensi daerahnya salah satunya dengan pengetahuan dan ketrampilan mengenai wirausaha dan teknologi tepat guna proses pembuatan sabun *handmade* yang dapat dijadikan sebagai souvenir desa untuk pencitraan Kabupaten Ciamis secara luas. Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah (1) Menerapkan teknologi tepat guna untuk proses pengolahan komoditas lokal pertanian dan perkebunan menjadi produk sabun *handmade*; (2) Meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama kelompok ibu-ibu PKK untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dan pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga; (3) Mempromosikan sabun *handmade* sebagai souvenir non-pangan dari Kabupaten Ciamis; dan (4) Menjalin kerjasama dengan pihak terkait serta pendampingan teknis untuk pengembangan bisnis sabun lebih lanjut. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa : (1) Kegiatan PKM ini dapat meningkatkan motivasi usaha, kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat melalui penerapan

teknologi tepat guna untuk mengolah komoditas lokal menjadi produk sabun handmade; (2) Peserta pelatihan terutama kelompok ibu-ibu PKK telah mengikuti serangkaian kegiatan pembuatan sabun handmade selanjutnya perlu dikembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk pengembangan bisnis sabun handmade ke depannya.

Cahyono, M. S., Harahap, D. H., & Sukrajap, M. A. (2019). Penerapan teknologi produksi makanan olahan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Bandung. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *3*(1), 21-30. Menjelaskan bahwa pengembangan teknologi tempat guna dengan Program penerapan teknologi tepat guna diharapkan menghasilkan paket teknologi produksi makanan olahan tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh mitra UKM untuk meningkatkan kapastitas produksi dan pendapatan. Metode yang dilakukan adalah pengembangan teknologi produksi makanan olahan tepat gunamulai dari mengindentifikasi kebutuhan rill mitra terkait operasional produksinya, merancang dan membuat mesin, melakukan pengujian terhadap mesin yang dibuat, melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UKM usaha produksi makanan olahan. Hasil kegiatan ini yaitu dapat membantu mengatasi permasalahan produksi yang dihadapi UKM, meningkatkan jumlah produksi dan bekerja secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Rahmiyati, N. (2015). Model pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna di Kota Mojokerto. JMM17*:* Jurnal Ilmu ekonomi dan manajemen, 2(02). Menjelaskan bahwa pengembangan teknologi tempat guna dengan tujuan pemberdayaan ″masyarakat″ miskin yang menggunakan ″Teknologi Tepat Guna″, adalah: 1). Mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif ″masyarakat″, memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, meningkatkan produktivitas dan mutu produksi.2). Menunjang pengembangan wilayah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab menuju

keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal, regional dan global. 3). Mendorong tumbuhnya inovasi di bidang ″teknologi″. Model tipe kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, berusaha untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang terkait dengan model pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna.

Populasi penelitian adalah semua lembaga pemberdayaan masyarakat yang berbasis penerapan teknologi tepat guna masyarakat yang mendapatkan hibah/bantuan penerapan teknologi tepat guna. Sampel diambil secara random di masing-masing Kecamatan. Teknik sampel menggunakan teknik insidental dan *purposive random sample*, dan analisis data menggunakan analisis Kualitatif pada 100 responden. Simpulan penelitian: 1). Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat hingga muncul perubahan yang efektif dan efisien. 2). Dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan perekonomian sangat diperlukan dukungan teknologi tepat guna yang relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat. 3). Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna cenderung mencari jalan "termudah" dalam menentukan sasaran atau penerima /calon adaptor teknologi tepat guna. 4). Terjadi masalah ke "Tepat gunaan" teknologi karena ketidak sesuaiannya antara teknologi tepat guna yang di implementasikan dengan kondisi lokasi. 5). Keberlanjutan usaha agar UMKM mandiri, perlu pendampingan teknis dan non teknis. 6). Peran Pemerintah adalah hal yang mutlak harus ada dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna

Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Bab II Pasal 3(c) yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya. Tujuan pembentukan dan pengembangan Posyantekdes juga tertuang dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 4(a) yaitu menjembatani masyarakat

pemanfaat, pengurus teknologi tepat guna dengan sumber teknologi tepat guna.

Tujuan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Bab II Pasal 3 (c) yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berati pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap.

Posyantekdes sebagai pusat pelayanan Teknologi Tepat Guna menjadi arah tujuan bagi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi. Pemberdayaan masyarakat melalui posyantekdes adalah langkah dalam peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dan merupakan solusi berkesinambungan dengan menguntungkan masyarakat yang menggunakannya. Tugas posyantekdes adalah membantu pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Posyantekdes juga harus mampu memberikan nilai tambah dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal. Urgensi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna terutama bagi masyarakat desa adalah menjadi langkah Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, menjadikan masyarakat desa mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam pedesaan.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1	IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG	2018	Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan masih banyaknya masyarakat di Kota Palembang yang belum merasakan kesejahteraan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palembang telah dilakukn melalui berbagai aspek, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna(Posyantek). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Pos Pelayanan Teknologi Tampa Guna (Posyantek) di Kecamatan Sako Kota Palembang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN KAPUAS	2021	Penelitian ini berjudul pemberdayaan masyarakat desa melalui program inovasi teknologi tepat guna di Kabupaten Kapuas. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu dikarenakan adanya masyarakat miskin di provinsi Kalimantan tengah, pengangguran di Kabupaten Kapuas dan kurang optimalnya dana desa dalam membantu perkembangan pemberdayaan masyarakat.

3	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) DI KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT	2020	Melalui program posyantek, ialah program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan Teknologi Tepat Guna, memberikan kegiatan produktif dan perubahan ekonomi kepada penerima manfaat hingga mandiri di dalam usahanya. Proses pemberdayaan Program Posyantek yang dilaksanakan oleh Posyantek Kecamatan Grogol Petamburan di bebrapa kelurahan melalui bebrapa tahapan. Yang mendominasi dalam tangga partisipasi terdapat 7 tangga kemitraan pada anak tangga keempat berarti memberikan peluang partisipasi yang lebih nyata dan berarti bagi keterlibatan masyarakat dalam pemerintah daerah.

Berdasarkan pada survey awal peneliti pada pengurus posyantekdes Desa Sidomulyo banyak pembahasan yang menjadi diskusi serta mengupas fenomena pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Desa Sidomulyo. Posyantekdes Sidomulyo sebagai pusat pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna berperan sebagai lembaga pelayanan yang senantiasa memberikan informasi dan pendayagunaan mengenai Teknologi Tepat Guna. Posyantekdes juga harus senantiasa berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait ditingkat kecamatan dan kabupaten agar terjalin kerjasama demi suksesnya pengelolaan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Posyantekdes memiliki empat fungsi, yaitu sebagai *channeling* artinya menghubungkan pembuat mesin dan konsumen (masyarakat), perpustakaan artinya menyediakan buku – buku dan cara – cara mengenai teknologi tepat guna, informasi artinya memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi tepat guna kepada masyarakat dan bengkel artinya menerima pemesanan dan memperbaiki alat – alat teknologi tepat guna. Penyebaran alat – alat teknologi tepat guna oleh Posyantekdes Desa Sidomulyo yaitu pemisah gabah dan perontok padi belum menyebar secara merata ke masyarakat

terutama petani padi, sebagian besar masyarakat desa yang tidak mendapat pelayanan teknologi tepat guna, dan rendahnya peminatan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna dapat berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui pengeloaan teknologi tepat guna karena pengelolaan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **"STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN".**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna Melalui Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna Di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Yang Menjadi Tujuan Dalam Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Teknologi Tempat Guna Melalui Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna Di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Institusi;

a) Penelitian ini untuk menyelesaikan program S1, guna mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.
b) Penelitian ini untuk menghasilkan informasi dan bermanfaat sebagai masukan , koleksi perpustakaan serta bahan referensi bagi peneliti berikutnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
c) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan baru yang bisa digunakan menjadi referensi dalam menjalankan tata kelola Pemerintahan Desa.

2. Manfaat Praktis ;
   a) Penelitian ini berguna untuk menambah wadah pengetahuan peneliti tentang bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan teknologi tempat guna. Posyantekdes (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa) di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
   b) Bagi pemerintah Desa Sidomulyo , di harapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan yang berguna untuk kedepannya.
   c) Bagi fakultas memberikan referensi dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa – mahasiswi yang akan melakukan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Strategi

2.1.1. Pengertian Strategi

Strategi memiliki banyak sekali definisi dalam perkembangannya sebagai sebuah konsep. Strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni strategeia,yang memiliki arti kepemimpinan dalam ketentaraan. Dalam perkembangannya, definisi konsep strategi semakin banyak dan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat diperhatikan dari beberapa konsep berbeda mengenai strategi berikut ini :

Strategi menurut Salusu (2006:101), yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat.

Menurut David (2010) Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang, Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, difersifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi, dan joint venture.

Menurut Ruung, 2014). Strategi secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu proses rencana pimpinan pucuk yang befokus pada tujuan

jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut di capai. Dan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai tindakan yang bersifat ingkramental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di massa depan.

Menurut Mahfudz, 2015:5). Stretegi juga bisa dikatakan sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut (Marrus 2002) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. “strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi , disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut (Umar 2011: 31) strategi merupakan tindakan yang bersifat incremenial (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkna sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competition*).

Marbun , (2003 : 341) bahwa “Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling hubungan dalam hal waktu dan ukuran”.

Bintaro (dalam Rusdiananingtyas, 2006: 1899) mengartikan bahwa strategi sebagai keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan pasti, guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan, dimana dalam strategi itu terdapat metode dan teknik. Strategi mencerminkan kesadaran organisasi mengenai bagaimana,

kapan, dan dimana ia harus bersaing; melawan siapa; dan untuk maksud apa.

2.1.2. Jenis-Jeni Strategi

Ada beberapa instansi atau organisasi yang menjalankan suatu strategi atau lebih secara bersamaan, namun hal tersebut dapat sangat beresiko dan mengancam jika dijalankan terlalu jauh dii perusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Ada pula instansi pemerintah atau organisasi yang bertahan untuk tetap hidup dengan menggunakan gabungan dari sejumlah strategi divestasi, seperti disensif, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan.Adapun Jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:

1) Strategi Integrasi, Strategi instegrasi terbagi 2 macam yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Suatu strategi integrasi vertikal atau dari atas kebawah dapat memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan / atau pesaing.
2) Strategi Intensif, Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.
3) Strategi Diversifikasi, Adapun strategi diversifikasi yang harus dipahami, yaitu diversifikasi horizontal, konglomerat dan konsenttrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Melengkapi suatu produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.
4) Strategi defensif, ada tiga strategi defensif yang perlu diketahui adalah strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi.

Rasionalisasi biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedangmenurun.

2.1.3. Tahap-Tahapan Strategi

Menurut (Bambang Hariadi :2005: 5), menjelaskan adanya 2 tahap-tahap strategi, yaitu:

1. Perumusan
   a) Actor tahap pertama yang mencakup analisis lingkungan didalan mencakup *(intern)* maupun keluar *(ekstern)* adalah penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi.
   b) Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang maksudkan untuk membangun visi dan misinya, merupakan tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan *customer value* terbaik.
   c) Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pemimpin. Pemimpin harus mampu menentukan misi untuk mencapai visi yang telah dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
   d) Lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
   e) Tentukan tujuan dan target.
   f) Dalam sebuah tahap strategi seorang pemimpin atau pengambil keputusan memulai dengan menentukan visinya dan menentukan langkah-langkah di masa depan dalam lingkungan terpilih dan misi apa yang harus ditunaikan atau dilakukan sekarang untuk mencapai cita-cita tersebut.
2. Pelaksanaan
   a) Setelah bagian perumusan strategi diselesaikan maka selanjutkan yaitu merupakan tahap krusial.
   b) Strategi perusahaan adalah tentang pelaksanaan strategi.

c) Implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan laksanakan melalui pembangunan struktur atau bagan, pengembangan program, b*udget* dan prosedur pelaksanaan.

Implementasi strategi merupakan sebuah langkah yang sulit dalam suatu proses strategi mengingat banyak sekali hal-hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dilapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung perusahaan yang *capable* dengan seorang pemimpin yang solid, alokasi sumber daya yang cukup, kebijaksanaan yang tepat, budaya, situasi dan kondisi terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi.

2.1.4. Ruang Lingkup Strategi

Strategi menurut Salusu (2006:101), yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat. Pemerintah ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect,* artiny adalam bahasa Indonesia Pemerintah sebagai pengarah dan mengatur jalannya administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya (Suhady dalam Riawan 2009: 197). Adapun pemerintahan dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan

eksekutif dan 18 kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009 : 197). Jadi menurut definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu strategi pemerintah adalah sebuah seni atau rencana yang akan dilakukan suatu lembaga atau instansi pemerintah untuk memberikan pengarahan dan administrasi yang berwenang atas setiap kegiatan masyarakat di dalam suatu Negara.

Rencana strategi merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan fokus pada visi, misi, falsafah dan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu menengah antara 3-5 tahun (Umar : 200 3). Adapun Indikator Strategi Pemerintah menurut Rencana Strategi Pemerintah menurut Rencana Strategi (RENSTRA: 2014-2018), di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, sebagai berikut :

1. Tersedianya administrasi perkantoran.

   Artinya pemerintah daerah khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Contohnya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, penyediaan jasa administrasi keuangan, rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah dan pelayanan administrasi perkantoran lainnya.
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

   Artinya pemerintah daerah harus menyiapkan segala perlengkapan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur contohnya. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan perlengkapan alat kantor, pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / operasional.
3. Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas

   Artinya pemerintah daerah lebih meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur agar terwujud birokrasi yang ideal contohnya belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.

4. Terwujudnya sistem informasi layanan gerak dan aduan
   Artinya pemerintah daerah khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Contohnya, Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.
5. Terciptanya sistem pelayanan yang baik
   Artinya pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Contohnya sosialisasi pelayanan perizinan, fasilitasi pengaduan masyarakat, dan penyediaan jasa pelayanan.

2.2. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya untuk menempatkan seluruh masyarakat pada posisi sentral dalam memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri berbagai aktifitas pembangunan. Pemberdayaan juga berupaya untuk menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Menurut (Supriyanto, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang, 2010). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan untuk kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya dalam membangun kemampuan *capacity building* masyarakat dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan kelembangaan, pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan tiga-p (penyuluhan, pendampingan dan pelaksanaan). penyuluhan akan merespon serta memantau segala perubahanperubahan yang ada di

masyarakat, pendampingan akan mendorong partisipasi masyarakat secara total dan pelayanan sebagai unsur berfungsi akan mengontrol pendistribusian aset sumber daya fisik maupun non fisik yang dibutuhkan masyarakat (Vitalaya dalam Mutmainnah, 2016).

Menurut Arif dalam Fadilah (2013) pemberdayaan merupakan upaya dilakukan untuk memampukan, memandirikan, serta mengangkat harkat dan 24 martabat masyarakat agar mampu membebaskan dirimya dari keterbelakangan dan perangkat kemiskinan. Maka dari itu tujuan utama daripada pemberdayaan adalah meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok yang memiliki ketidakberdayaan baik dari kondisi internal (misalnya, anggapan dari mereka sendiri), maupun dari kondisi eksternal (misalnya, diskriminasi struktur sosial).

Pendapat lain menurut Sumodinigrat yang dikutif Arif dalam Fadillah (2013) arah pemberdayaan masyarkat secara umum berdasar pada dua tujuan utama yakni :

a) Melepaskan perangkap keterbelakangan dan kemiskinan
b) Menguatkan posisi masyarakat dalam stuktur kekuasaan Pemberdayaan bertujuan untuk dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan masyrakat atau orang-orang lemah dan tidak beruntung (Ife dalam Mutmainna, 2016). Sebab dengan adanya pemberdayaan maka akan memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat lemah.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57).

Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan

semua potensi". Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Ife (dari buku Suhendra, 2006:77) adalah "meningkatkan kekuasaan atas mereka yang 16 kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*)".

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya darisubjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya, (Tantan Hermansyah dkk, 2009:31). Setelah kita memahami mengenai definisi pemberdayaan, selanjutnya akan dibahas mengenai definisi pemberdayaan masyarakat menurut para ahli.

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

1) Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat

yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.

2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut (Widjaja, 2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat 18 dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. (Abu Huraerah, 2008:87) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Pengertian pemberdayaan adalah proses pengembangan dan pembangunan masyarakat menuju perubahan yang layak bagi kehidupan mereka. Karena inti dari pemberdayaan itu adalah perubahan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut (Sumodiningrat, 2009) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penuruan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan, serta berlandasikan iman dan taqwa.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan yang sedang dalam kondisi yang kurang beruntung (miskin), sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari dengan pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan.

Pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memilik kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas – tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai proses.

Menjalin hubungan kerja yang kondusif dan mengetahui ukuran – ukuran kinerja yang dicapainya, akan membuat pekerjaan mereka lebih menyenangkan.Tujuan dari pengembangan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh mencakup :

a. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok – kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksebilitas dan pilihan – pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan standar kemanusiaan jadi konsep pemberdayaan masyarakat adalah proses mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya dan inti dari pemberdayaan masyarakat adalah perubahan pada masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan indikator penting dalam mewujudkan visi misi Indonesia bebas dari kemiskinan dengan masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam bidang ekonomi.

2.2.2. Jenis-Jeni Pemberdayaan Masyarakat

Berikut jenis-jenis Pemberdayaan Masyarakat di antaranya:

1) Sikap Radikal

   Sikap radikal ialah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagai upaya untuk membentuk segala pembangunan dalam masyarakat melalui sistem kekuatan. Sistem ini dapat dipaksakan sebagai sitem paksaaan yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat.

2) Sikap Kebersamaan

   Sikap kebersaan ialah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan dalam masyarakat. Kebersaan tersebut dilakukan dengan langkah akomodasi dari setiap kepentingan serta golongan dalam masyarakat.

3) Pedekatan dengan Sistem Gagasan

Sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan dilakukan secara tidak langsung dengan memberikan stimulasi daripada memberikan *powe*r kepada *powerless*. Keadaan tersebut dapat diakomodir masyarakat melaui interaksi sosial dalam masyarakat yang baik dan akhirnya menimbulkan integrasi kepentingan bersama.

2.2.3. Tahap-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses dari inisiasi, pelayanan, pendampingan, advokasi, dan fasilitasi kepada masyarakat. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto mengemukakan bahwa sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu :

a. Tahap pertama yaitu tahap penyadaran, target yang hendak diberdaya diberi pencerahan dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu.
b. Tahap selanjutya adalah tahap mengkapasitasan atau *capacity building* atau *enabling* yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.
c. Tahapan yang terakhir adalah pemberian daya yaitu melakukan pembinaan kepada masyarakat. Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau perluang.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menguggah kesadaran masyarakat. Selanjutnya definisi dari Saparjan dan Suyanto (2003:43) pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan menentukan masa depan mereka. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana

memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan arah kehiupan dalam komunitasnya.

2.2.4. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya dalam membangun kemampuan *capacity building* masyarakat dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan kelembangaan, pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan tiga-p (penyuluhan, pendampingan, dan pelaksanaan). penyuluhan akan merespon serta memantau segala perubahanperubahan yang ada di masyarakat, Pendampingan akan mendorong partisipasi masyarakat secara total, dan pelayanan sebagai unsur berfungsi akan mengontrol pendistribusian aset sumber daya fisik maupun non fisik yang dibutuhkan masyarakat (Vitalaya dalam Mutmainnah, 2016).

Menurut Arif dalam Fadilah (2013) pemberdayaan merupakan upaya dilakukan untuk memampukan, memandirikan, serta mengangkat harkat dan 24 martabat masyarakat agar mampu membebaskan dirimya dari keterbelakangan dan perangkat kemiskinan. Maka dari itu tujuan utama daripada pemberdayaan adalah meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok yang memiliki ketidakberdayaan, baik dari kondisi internal (misalnya, anggapan dari mereka sendiri), maupun dari kondisi eksternal (misalnya, diskriminasi struktur sosial).

Pendapat lain menurut Sumodinigrat yang dikutif Arif dalam Fadillah (2013) arah pemberdayaan masyarkat secara umum berdasar pada dua tujuan utama yakni :

a) Melepaskan perangkap keterbelakangan dan kemiskinan
b) Menguatkan posisi masyarakat dalam stuktur kekuasaan Pemberdayaan bertujuan untuk dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan masyrakat atau orang-orang lemah dan tidak beruntung (Ife dalam Mutmainna, 2016). Sebab dengan adanya

pemberdayaan maka akan memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat lemah.

Secara umum ruang lingkup pemberdayaan didasarkan pada bidang-bidang yang sering menjadi obyek dalam pemberdayaan masyarakat. Ndraha (2003) dan Supriyatna (tt) menentukan bahwa lingkup pemberdayaan masyarakat terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu bidang: (1) politik; (2) ekonomi; (3) sosial budaya; dan (4) lingkungan. Bidang agraria, pertanahan dan tata ruang tidak secara spesifiks disebutkan sebagai salah satu lingkup pembedayaan. Hal ini dapat dipahami, mengingat bidang agraria, pertanahan dan tata ruang berada pada keempat lingkup dan pembidangan tersebut. Meskipun demikian, pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan dapat ditambahkan sebagai salah satu lingkup pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada bidang-bidang pemberdayaan.

Pemberdayaan pada lingkup politik diorientasikan agar masyarakat mempnyai bargaining position (daya tawar) yang tinggi apabila berhadapan dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah, kalangan LSM, maupun kalangan swasta yang mempunyai agenda atau proyek di wilayah masyarakat. Daya tawar ini sangat dibutuhkan agar posisi masyarakat tidak menjadi sub ordinat dihadapan stake holder yang lain. Pemberdayaan pada lingkup ekonomi, biasanya berhubungan dengan kemandirian dalam penghidupan masyarakat. Dalam hal ini upaya-upaya produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan atau menjadi gantungan hidup menjadi fokus dalam lingkup pemberdayaan bidang ekonomi.

Pemberdayaan pada lingkup sosial budaya berhubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Orientasi pemberdayaan pada lingkup sosial budaya ini berkisar pada penguatan soliditas masyarakat, pengurangan kerentanan terhadap konflik, serta penguatan solidaritas sosial. Dalam

lingkup ini termasuk juga kesadaran masyarakat terhadap kondisi masyarakat yang plural, baik secara etnik, kepercayaan/agama maupun status sosialnya.

Pemberdayaan pada lingkup lingkungan berfokus pada upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar terjaga kelestariaannya. Upaya-upaya ini ini hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami dan peduli terhadap kondisi lingkungan dan keberlanjutannya. Pemahaman dan kepedulian masyarakat ini hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui upaya-upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan pada lingkup agraria, pertanahan dan tata ruang sebetulnya bukanlah lingkup yang umum, namun disisipkan untuk menunjukkan bahwa lingkup pemberdayaan masyarakat perlu dikontekskan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang mengatur tentang agraria, tata ruang dan pertanahan. Apabila lingkup ini dipersempit maka lingkup pemberdayaan bidang pertanahan menjadi hal yang urgent. Dalam konteks ini, pemberdayaan pada lingkup pertanahan diorientasikan agar masyarakat menjadi berdaya ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan pertanahan. Keberdayaan ini menjadikan masyarakat terbebas dari dominasi aparatur pemerintah di bidang pertanahan yang berujung pada pelayanan pertanahan yang egaliter, adil dan bebas pungli.

Apabila lingkup pemberdayaan masyarakat didasarkan pada proses, dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) hal, yakni: (1) pra pemberdayaan, yang berupa menciptakan ruang interaksi yang kondusif agar masyarakat merasa percaya diri dan mampu untuk menjadi pelaku pembangunan; (2) pelaksanaan pemberdayaan, yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang setara dengan pemangku kepentingan lainnya; dan (3) pasca pemberdayaan, dimaksudkan bahwa lingkup ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus berproses dalam pemberdayaan meskipun

keterlibatan pemangku kepentingan lain sudah berakhir, karena keterbatasan waktu, penganggaran dan kegiatan. Dalam konteks ini, pemangku kepentingan di luar masyarakat secara institusional tetap terlibat dalam mendukung dan memfasilitasi dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat yang terus menerus berlangsung.

2.3. Tinjauan Pengembangan Tentang Teknologi Tepat Guna

2.3.1. Pengertian Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berati pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap.

Menurut Hafsah (2000:198) pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia, usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Adapun pendapat lain Menurut Yoder (2001:20) menjelaskan bahwa pengembangan adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan.

Teknologi adalah indikator penting dalam bagian kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan masyarakat pemanfaatan teknologi sangat penting dalam menunjang efisiensi, memudahkan

pekerjaan dan memberi nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Namun pada umumnya, teknologi diasumsikan pada seperangkat alat yang dapat memberi dampak buruk pada manusia dan lingkungan melalui pencemarannya. Tidak jarang pula teknologi membutuhkan modal besar dan cara pemakaian yang rumit sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menengah kebawah. Padahal dengan berkembangnya zaman masyarakat dituntut untuk menguasai teknologi dan memanfaatkannya. Indonesia yang dilimpahi sumber daya alam yang beragam harus mampu diolah menjadi produk oleh masyarakat yang tentunya pasti membutuhkan teknologi. Teknologi Tepat Guna hadir sebagai jembatan antara teknologi tradisional dan teknologi modern. Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi merupakan salah satu pilihan yang tepat agar masyarakat mampu berdaya dengan dukungan faktor teknologi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa Teknologi Tepat Guna atau TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dapat dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Pada beberapa wilayah di Indonesia, untuk memudahkan pemusatan pemanfaatan Teknplogi Tepat Guna, maka dibentuk POSYANTEK (Pos Pelayanan Teknologi). Di Kabupaten Pesawaran, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna desa dipusatkan di pos layanan teknologi tepat guna desa (POSYANTEKDES) yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bentuk implementasi dari PERMENDESA Nomor 23 tahun 2017. Keberadaan Posyantekdes dibeberapa desa bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan dan

kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Urgensi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna terutama bagi masyarakat desa adalah menjadi langkah Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, menjadikan masyarakat desa mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam pedesaan.

2.3.2. Jenis-jenis Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pengusul Program Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna wajib melaksanakan kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Melakukan survei awal sebagai langkah *need assesment* perangkat teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat beserta analisis situasinya dan studi pustaka termasuk penelusuran sejarah teknologi.
2. Merancang dan menciptakan teknologi tepat guna
3. Melakukan uji coba hasil kegiatan baik di laboratorium maupun di lapangan.
4. Mengadakan layanan informasi pengoperasian atau penggunaan teknologi tepat guna terhadap masyarakat sasaran
5. Mengadakan pelatihan dan pendayagunaan teknologi tepat guna kepada masyarakat sasaran
6. Memberikan konsultasi perawatan dan pemeliharaan teknologi tepat guna yang berhasil diciptakan
7. Mengadakan peninjauan secara berkala di lapangan dalam penerapan teknologi tepat guna yang dihasilkan

2.3.3. Tahap-Tahapan Teknologi Tepat Guna

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tahap ini menggambarkan bahwa pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, agar dapat

memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan efektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, (Sulistiyani, 2004: 83).

2. Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan mengalami proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pebangunan, (Sulistiyani, 2004: 83-84).
3. Tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, agar mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi dilingkungannya. Apabiala masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini, maka masyarakat akan dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Konsep pembangunan masyarakat menggambarkan bahwa pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan pada subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja, (Sulistiyani,2004: 84)

Menurut Bradfield (1966) dalam (Mardikanto, 2012:254), yang menawarkan siklus, terdiri dari sepuluh tahapan proses kegiatan pemberdayaan, yaitu :

1) pengumpulan data keadaan,
2) analisis data keadaan,
3) identifikasi masalah,
4) pemilihan masalah yang dipecahkan,
5) tujuan program,
6) pemecahan masalah,
7) rencana kegiatan,
8) pelaksanaan kegiatan,
9) evaluasi kegiatan,
10) hasil yang dicapai

Pengumpulan data keadaan, merupakan kegiatan pengumpulan data dasar (data *base*) yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan. Pengumpulan data keadaan dilakukan dengan memanfaatkan data skunder yang kemudian dilengkapi dengan kegiatan survey mandiri yaitu serangkaian kegiatan pengumpulan data, wawancara, dan pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama fasilitatornya. Data yang dikumpulkan mencakup:

1) Keadaan sumber daya, yang meliputi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,sarana prasarana,
2) Teknologi yang digunakan, baik yang menyangkut : bahan, alat/perlengkapan, teknik atau cara-cara, maupun “reka-yasa sosial” yang sudah diterapkan,
3) Peraturan
4) Analisis data keadaan ialah, kegiatan penilian keadaan penilaian keadaan yang dalam praktik dilakukan melalui kegiatan PRA/PARA yang mencakup :
5) analisis tentang diskripsi data keadaan,

6) penilaian atas keadaan sumber daya, teknologi dan peraturan yang ada,
7) pengelompokan data keadaan kedalam, (a) data aktual dan data potensial, (b) keadaan yang ingin dicapai dan yang sudah tercapai (c) teknologi yang dapat digunakan dan dikembangkan dan yang sudah digunakan, (d) Peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan yang dapat diberlakukan.

Identifikasi masalah, merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau factor-faktor menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki (Mardikanto, 2012 : 256). Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menganalisis kesenjanan :

1) antara data-potensial dengan data aktual,
2) antara keadaan yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai,
3) antara teknologi yang seharussnya digunakan/diterapkan dengan yang sudah diterapkan,
4) antara peraturan yang harus dilakukan/diberlakukan dengan praktik atau kenyataan yang dijumpai dalam penerapan peaturan-peraturan tersebut.

Pemilihan Pemecahan masalah pada perencanaan program pemberdayaan masyarakat adalah:

1) pemilihan pemecahan masalah yang benarbenar menyangkut kebutuhan nyata (*real-need*) yang sudah dirasakan masyarakat,
2) pemilihan pemecahan masalah yang segera harus diupayakan,
3) pemilihan pemecahan masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan banyak hal yang harus ditangani bersama-sama oleh banyak pihak secara terpadu,
4) memiliki pengaruh yang besar demi keberhasilan pembangunan dan pembangunan masyarakat pada umumnya,
5) lebih lanjut, dalam pemilihan masalah yang ingin dipecahkan, perlu dilakukan analisis terhadap "*impact point*", yaitu ; masalah-masalah strategis yang relative mudah dilaksanakan dengan

> biaya/korbanan sumberdaya yang relative murah, tetapi mampu memberikan manfaat yang sangat besar ditinjau dari perubahan perilaku, peningkatan produktivitas, dan perbaikan pendapatan serta mutu hidup masyarakat banyak (Mardikanto, 2012 : 257-258)

Perumusan tujuan seperti ini, perlu diperhatikan agar penerima manfaat yang hendak dicapai haruslah realistis, baik ditinjau dari kemampuan sumber daya (biaya, jumlah dan kualitas tenaga) maupun dapat memecahkan semua permasalahan sampai tuntas, tetapi dapat dirumuskan secara bertahap dengan targettarget yang realistis. Seperti halnya dalam analisis data keadaan, perumusan tujuan sejauh mungkin juga dinyatakan secara kuantitatif. Hal ini sangat penting, agar kemudahan perumusan rencana evaluasi yang akan di lakukan (Mardikanto, 2012 : 258).

Alternatif pemecahan masalah pada hakikatnya dapat dipecahkan melalui beberapa alternative yang dapat dilakaukan, yang masing-masing menuntut kondisi yang berbeda-beda, baik yang menyangkut besrnya dana, jumlah dan kualitas tenaga yang dipersiapkan, peraturan-peraturan yang harus diadakan, serta batas waktu yang diperlukan, sehubungan dengan itu, setiap fasilitator seharusnya selalu berfikir realistis sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Untuk itu, perumusan tujuan seharusnya tidak dilandasi oleh pemikiran untuk mencapai penerima manfaat yang terbaik yang diinginkan, tetapi sekedar yang terbaik yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya, dengan dukungan teknologi, peraturan dan waktu yang tersedia.

Perencanaan kegiatan adalah tindakan merumuskan apa, bagaimana, siapa dan bilamana suatu kegiatan akan dilakukan. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Rencana adalah pemikiran

atau gagasan mengenai tindakan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan.rencana kegiatan mencakup;

1) Deskripsi program/kegiatan yang akan dilakukan,
2) Jumlah unit, frekuensi dan volume kegiatan,
3) Metode pelaksanaan kegiatan,
4) Lokasi pelaksanaan kegiatan,
5) Waktu pelaksanaan kegiatan,
6) Bahan dan peralatan/perlengkapan yang diperlukan,
7) Pihak-pihak yang dilibatkan,
8) Jumlah dan sumber dana.

2.3.4. Ruang Lingkup Teknologi Tempat Guna

Ruang lingkup kegiatan program Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kualitas unggulan daerah. Dengan demikian kegiatan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna ini harus dilandasi kebutuhan nyata masyarakat industri dan atau masyarakat pada umumnya,sehingga skala prioritas dalam pengembangan teknologi tepat guna. Masalah lingkungan, meliputi upaya pemanfaatan limbah, penggunaan teknologi ramah lingkungan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, kekeringan serta penyediaan air bersih.

1) Masalah yang berkaitan dengan teknologi dan manajemen produksi terutama pada industri kecil dan menengah. Banyak produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan produk lain karena mutu yang rendah dan harga tinggi akibat inefisiensi produksi. Penguasaan teknologi produksi yang rendah menyebabkan beberapa industri tidak mampu menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing di pasar nasional maupun internasional.
2) Masalah yang berkaitan dengan penanganan pasca panen. Masalah ini berkaitan dengan teknologi untuk proses pengolahan hasil

panen baik dalam rangka diversifikasi produk maupun peningkatan nilai tambah. Produk pertanian yang dapat diolah lebih lanjut sehingga mempunyai nilai ekonomi tinggi, namun karena ketiadaan teknologi pasca panen menyebabkan nilai tambahnya tetap rendah.

3) Pengelolaan limbah produksi, limbah domestik dan limbah pertanian dimana banyak limbah yang potensial mempunyai nilai komersial dan dapat dimanfaatkan masyarakat namun belum dapat ditangani dan diolah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi
4) Masalah sosial kemasyarakatan, seperti kasus kerusuhan sosial, penyelesaian masalah tanpa prosedur hukum (main hakim sendiri) merupakan persoalan yang menganggu keamanan dan kenyamanan bermasyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Perlu diupayakan *social engenering* untuk mengatasi hal tersebut.
5) Teknologi informasi untuk kepentingan peningkatan kegiatan bisnis dan pelayanan umum belum banyak dimanfaatkan oleh usaha kecil dan menengah Industri yang berorientasi ekspor seperti meubel, jamu tradisional, pakaian dan sejenisnya jadi sangat membutuhkan komunikasi yang efektif melalui internet maupun alat komunikasi lainnya.
6) Masalah konservasi energi yang hingga saat ini belum tergali secara optimal.
7) Masalah transportasi, disamping sering terjadi kemacetan juga kenyamanan berkendaraan umum kurang terjamin juga masih banyak daerah yang rendah akses transportasinya.
8) Masalah material alternatif yang selama ini belum tergarap/tergali yang merupakan potensi daerah dalam peningkatan sendi-sendi ekonomi, perlu sentuhan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
9) Masalah pembangunan pendidikan

2.4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 23 Tahun 2017 di Desa Sidomulyo, Tahapan Pemberdayaan Masyarakat melalui;

1) Tahap pertama yaitu tahap penyadaran, target yang hendak diberdaya diberi pencerahan dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu.
2) Tahap selanjutya adalah tahap mengkapasitasan atau *capacity building* atau *enabling* yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.
3) Tahapan yang terakhir adalah pemberian daya yaitu melakukan pembinaan kepada masyarakat. Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau perluang.

Serta mengetahui tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan teknologi tempat guna melalui posyantekdes (pos pelayanan teknologi tepat guna desa) di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

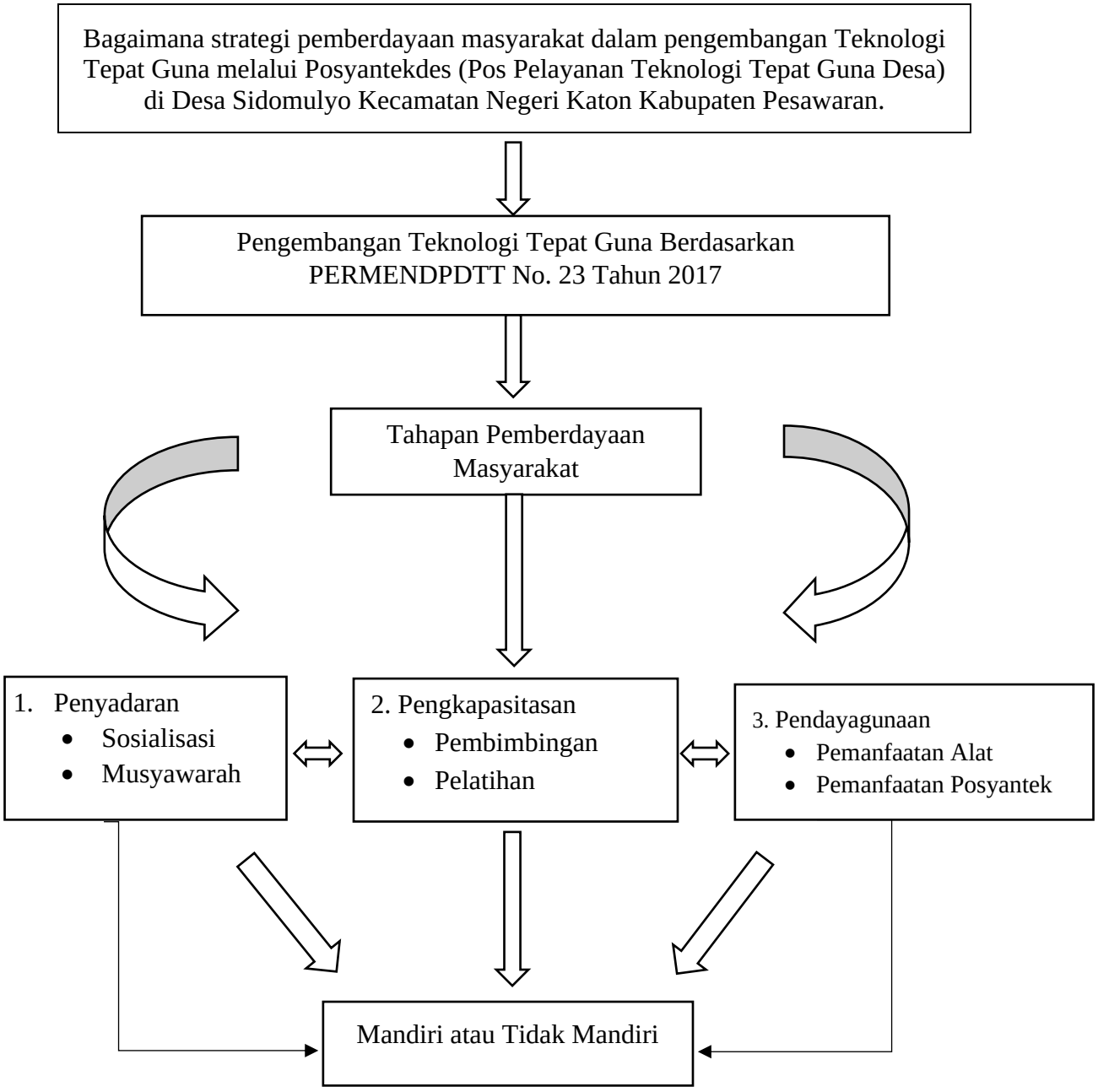

Gambar 2.1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan,penyajian dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum (Silaen dan Widiyono,2013:16). Penelitian Strategi Pemebrdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Teknologi Tempat Guna (Studi Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran). Menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penilitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2014:5). Penelitian kualitatif adalah peneilitian yang bersifat alamiah, penilitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penilitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpokir yang akan digunakan dalam penelitian (Kurniawan, 2012:22).

Metode deskriptif dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak , atau sebagaimana adanya. Usaha mendiskripsikan fakta-fakta itu pada saat permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya. Metode penilitian deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (Amiruddin, 2016:98).

Alasan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah dalam menganalisis sebuah fenomena sangat membutuhkan dukungan data yan diperoleh dengan tehnik wawancara, lalu selanjutnya yaitu pengkajian mengenai faktor-faktor penyebab membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau diperhitungkan dalam sistem angka dan mendiskripsikan fakta-fakta secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya. Dalam menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian akan menganalisis mengenai apa saja strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan teknologi tempat guna di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu.

Pada umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data melalui survei memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Informasi yang di peroleh dari sekumpulan orang-orang yang dipercayai;
2) Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang tersebut merupakan sampel;
3) Informasi yang di peroleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan.

Menurut Sarwono (2006) dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri. Sasaran utama penelitian kualitatif ialah manusia karena manusialah sumber masalah dan sekaligus penyelesaian masalah Penelitian kualitatif menurut Ruslan (2013) bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu,

tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umun tentang kenyataan-kenyataan tersebut menggunakan data yang pasti merupakan kriteria dari penelitian secara kualitatif dimana pengertian dari data yang pasti itu sendiri merupakan data yang sebenarnya terlihat dan terucap, tetapi mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut, diperlukan beberapa sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakn peneltiannya supaya memeroleh informasi mengenai data-data yang diperlukan untuk pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

3.3. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria

inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exlusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2014).

Fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu berfokus pada peran kepala adat dalam menangani konflik yang ada di masyarakat Desa Sidomulyo.

3.4. Jenis Data Penelitian

Menurut Lofland dalam Moleong (2014) sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan observasi, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini yakni:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

2. Data Sekunder

   Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan lewat studi kepustakaan atau studi dokumentasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang berumber dari dokumen negara berupa Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri, jurnal

ilmiah, artikel, situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

3.5. Informan

Menurut sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, tekhnik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik *Purposive Sampling* (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan informasi dari sumber data dilakukan dengan menentukan seseorang sebagai di anggap paling mengetahui informasi yang kita harapkan, bisa saja dia sebagai pimpinan sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu informasi disebut dengan *purposive sampling.* Adapun daftar narasumber yang akan diwawancarai, yaitu :

Tabel 3.1. Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Dian Yudistira	Kepala Bidan Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Dinas PMD Pesawaran
2.	Mulyadi	Kepala Desa Sidomulyo
3.	Isgiyanto	Ketua LPM Desa Sidomulyo
4.	Timan	Warga Desa Sidomulyo

(Sumber : Diolah Peneliti, 2023)

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu tiga cara yang sesuai dengan kebutuhan peneliti antara lain:

3.6.1. Observasi

Purwanto (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008) mengatakan istilah observasi adalah metode atau cara menganalisis dan pencatatan secara sitematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat atau mengamati

langsung kelompok yang dituju. Peneliti melakukan observasi secara partisipan (participant observation), yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2008).Tujuan dilakukannya pengamatan ini adalah untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku yang nyata dan memahami perilaku tersebut (Adi, 2004).

3.6.2. Wawancara

Wawancara mendalam menurut (Moelong, 2014) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai fokus pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

3.6.3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006) dokumnetasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku dan surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang digunakan sebagai pelengkap hasil wawancara. Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian.

3.7. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yaitu peneliti melakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (Singarimbun, 2008), terdiri dari:

3.7.1. Editing Data

Menurut Moh Pabundu Tika (2005) Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan pengisisan kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara supaya layak untuk disajikan. Kemudian dari observasi peneliti coba deskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah peneliti gabungkan dan disajikan. Ada beberapa dokumen yang memang tidak lengkap untuk tidak disajikan dan memilih data yang memang diperlukan saja untuk menunjang hasil dari penelitian tersebut.

3.7.2. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah tahapan yang dilakukan dengan tujuan mengkaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dengan hipotesis penelitian antara diterima ataukah ditolak, sehingga dalam hal ini menjelaskan terkait dengan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang tersedia (Abror, 2013).

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diedit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian

3.8. Teknik Analisis Data

Pada tipe penelitian kualitatif jenis deskriptif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, sudah dapat diolah dan dilakukan analisis. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari:

3.8.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman, 1992). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah menajamkan analisis, mengkategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data

yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

3.8.2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 1992). Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui tahap reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif, bagan, hubungan antar indikator serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut memermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi.

3.8.3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah yang dilakukan untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Setelah melakukan reduksi data, penyajian data, maka peneliti harus melakukan verifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

3.9. Teknik Validasi Data

Teknik validasi tidak hanya digunakan untuk menyangkal hal yang dituduhkan terhadap konsep penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, akan tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut merupakan tahapan yang tidak lepas dari tubuh pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020). Menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu

pengecekan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mengecek melalui sumber lain. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan sumber yang sama dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Fakhruddin,2017).

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak antara 1.040° sampai dengan 1.050° bujur timur dan 507° sampai dengan 548° lintang selatan. Secara umum memiliki iklim hujan tropis sebagaimana iklim Propinsi Lampung pada umumnya, curah hujan per tahun berkisar antara 2.264 mm sampai dengan 2.868 mm dan hari hujan antara 90 sampai dengan 176 hari/tahun.

Arus angin di Kabupaten Pesawaran bertiup dari Samudera Indonesia dengan kecepatan rata-rata 70 km/hari atau 5,83 km/jam sedangkan temperatur udara berkisar antara 26 °C sampai dengan 29 °C dan suhu rata-ratanya adalah 28°C.Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, maka wilayah administrasi Kabupaten Pesawaran mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. 39
3. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Adiluwih, Sukoharjo, Gadingrejo, dan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Pesawaran

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 km2 atau 117.377 ha dengan Kecamatan Padang Cermin sebagai kecamatan terluas, yaitu 31.763 ha. Dari luas keseluruhan Kabupaten Pesawaran tersebut, 13.121 ha digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 104.256 ha merupakan lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Jenis penggunaan lahan sawah yang terbanyak adalah irigasi tehnis dengan dua kali penanaman padi dalam setahun. Sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah yang terbanyak adalah hutan negara.

4.2. Gambaran Umum Dinas PMD Kabupaten Pesawaran

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa setiap daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) 1 tahun. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata (transparan) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab (akuntabel). Sejalan dengan kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat menganut Asas Desentralisasi, artinya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan nasional tentang pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Pesawaran sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Pesawaran yang meliputi Penataan Desa, Pemberdayaan Ekonomi dan Kerjasama Desa serta termasuk

Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa. Untuk mewujudkan kewajiban dalam mempertanggung jawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026.

4.2.1 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran dimaksudkan untuk:

1) Sebagai panduan dasar pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
2) Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda Kabupaten Pesawaran dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah.
3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pesawaran terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4) Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 adalah :

1) Menjamin kesinambungan, sinergitas, dan konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kegiatan selama 5 (lima) tahun dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.
2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan memantapkan akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Pesawaran.
3) Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Pengukuran Akuntabilitas Kinerja baik tahunan maupun lima tahunan Bappeda Kabupaten Pesawaran.
4) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4.2.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

a. menyelenggarakan sinkronisasi kebijakan urusan bidang pemberdayaanmasyarakat dan desa dan urusan bidang transmigrasi dalam pencapaian sasaran kinerja dinas;
b. menyelenggarakan program dan kebijaksanaan teknis urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan bidang transmigrasi dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dinas;
c. menyelenggarakan pembinaan, pengoordinasian, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan

bidang transmigrasi agar sesuai dengan perencanan yang telah ditentukan;

d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait dalam urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan bidang transmigrasi, agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan;
e. menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;;
f. menyelenggarakan kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desadan urusan bidang transmigrasi yang ditetapkan oleh Bupati;
g. menyelenggarakan pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
h. menyelenggarakan pemahaman dan pengetahuan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan bidang transmigrasi sebagai acuan pelaksanaan tugas;
i. menyelenggarakan pembagian habis tugas kedinasan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan bidang transmigrasi teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada di lingkungan dinas mengetahui dan memahami beban tugas dan tanggungjawabnya;
j. menyelenggarakan pemberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
k. menyelenggarakan pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang transmigrasi;

l. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil;
m. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari bawahan;
n. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perencanaan pembangunan daerah yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :

a. Sekretariat;
b. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
c. Bidang Perencanaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Bidang Kerjasama dan Kawasan Desa; dan
e. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan

4.2.3 Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka penyusunan Program Kerja Dinas sebagai pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan pemberdayaan dan pembinaan ekonomi masyarakat;
c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kemitraan dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakat;
d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) serta teknologi tepat guna (TTG);
e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan, monitorng dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) serta teknologi tepat guna (TTG);
f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi masyarakat;
g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi masyarakat;
h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan partisipasi kemasyarakat;
i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaporan dan evaluasi kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun Program Kerja Dinas lebih lanjut;
j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan, dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

a. Kelompok Substansi Pemberdayaan Masyarakat;
b. Kelompok Subtansi Pembinaan Kemasyarakatan; dan
c. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

4.2.4 Kelompok Jabatan Fungsional

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah selompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
c. Sub-koordinator melaksanakan tugasmembantu Kepala unit kerja dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompoksubstansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
d. Sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala perangkat daerah.
e. Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan.

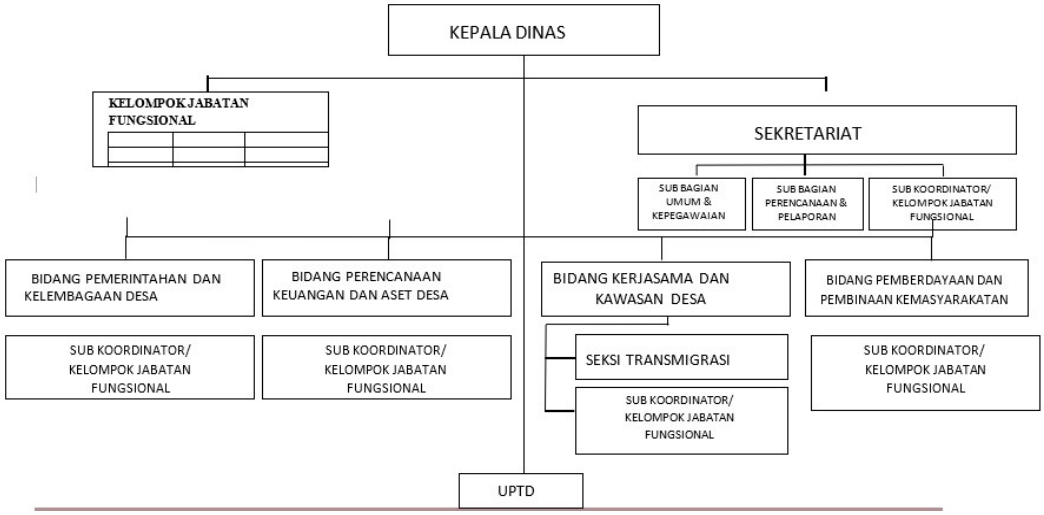

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas PMD

4.2.5 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Pesawaran tahun 2021 – 2026 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026, yaitu

"Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif."

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Pesawaran secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

Maju : Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Pesawaran yang lebih diperhitungkan di Provinsi Lampung dan Nasional berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.

Sejahtera : Dapat dimaknai dengan kondisi Kabupaten Pesawaran yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah.

Masyarakat Produktif : Dapat dimaknai sebagai Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang memiliki sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dan bernilai lebih dalam mengelola sumber daya di sekitarnya.

Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah" dan misi Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika**.**

4.3. Gambaran Umum Desa Sidomulyo

Sidomulyo adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. Negerik Katon adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia. Desa Sidomulyo pada mulanya masih berbentuk Dusun (Pedusunan) atau Dukuh (Pedukuhan), dahulu masuk Desa Kagungan Ratu Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan Desa Kagungan Ratu sendiri berdiri sejak tahun 1945 dengan penjabat Kepala desanya bernama Mursalin. Pada Tahun 1982 Sidomulyo berdiri menjadi sebuah Desa sendiri mekar (memisahkan diri) dari Desa Induk (Desa Kagungan Ratu), pemekaran tersebut bersamaan dengan desa Lumbirejo dan Desa Roworejo yang menjadi tetangga desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo berkecamatan di Gedongtatan Kabupaten Lampung Selatan, namun pada tahun 1998 Desa sidomulyo berubah kecamatannya menjadi ber-kecamatan Negerikaton, karena Kecamatan Negerikaton adalah hasil pemekaran kecamatan dari kecamatan Gedongtataan Kabupaten Lampung selatan. Selanjutnya dengan terbitnya undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, maka berubah menjadi Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran sampai sekarang ini.

4.3.1 Letak dan Luas Wilayah.

Desa Sidomulyo merupakan salah satu dari 21 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. yang terletak di sebelah Barat Laut dari arah kecamatan yang berjarak kurang lebih 9 kilo meter dan dikelilingi oleh 4 Desa Kecamatan Negerikaton, yaitu:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Poncokresno
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Trisnomaju
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lumbirejo, dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Roworejo dan desa Tritunggal Mulyo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Selain jarak dari Kecamatan, Desa Sidomulyo berjarak 21 Kilometer dari Ibukota Kabupaten dan berjarak 46 Kilo meter dari Ibukota Provinsi Desa Sidomulyo mempunyai luas wilayah kurang lebih 1.182 Hektar atau seluas 11,82 Kilometer persegi. Seluruh wilayah Desa Sidomulyo adalah merupakan dataran rata, tidak ada gunung atau perbukitan sebagian besar merupakan areal tegalan/peladangan, persawahan dan perke bunan.

4.3.2 Iklim

Iklim Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton seperti hal nya iklim di desa-desa di wilayah Indonesia pada umumnya yaitu Iklim kemarau dan penghujan dan ada iklim pancaroba (masa peralihan dari habis iklim kemarau menuju iklim penghujan). Dua iklim tesebut di atas (kemarau dan penghujan) berpengaruh langsung terhadap aktifitas petani dalam mengolah lahan garapan pertanian di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Jumlah bulan hujan rata-rata 7 bulan per tahun dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mdl dengan suhu rata-rata 30-32 derajat celcius2

4.3.3 Pemerintahan Desa Sidomulyo

Pemerintah desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten pesawaran Provinsi Lampung berdasar Undang-undang tentang desa nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 adalah terdiri dari: Kepala desa, sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, selengkapnya sebagai berikut

4.3.4 Visi dan Misi

Dari sejarah perkembangan desa Sidomulyo serta kondisi masyarakat yang ada sekarang ini dengan didukung potensi dan masalah yang ada di Desa Sidomulyo maka harapan dan pengembangan desa kedepan perlu adanya visi dan misi untuk mengatasi masalah dan mengelola potensi yang ada dalam menuju kesejahteraan masyarakat.

a. Visi

   Pembangunan Kabupaten Pesawaran pada tahap pertama RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2011-2016 dan RPJM Daerah tahun 2017-2022 menuntut perhatian yang serius, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan ketika Kabupaten Pesawaran masih menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan sebagai kabupaten

induknya, dan menjadi kabupaten sendiri, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Kabupaten Pesawaran yang strategis berada pada tengah-tengah jalur koridor tengah Provinsi Lampung, mendorong Pesawaran berperan sebagai daerah muka bagi wilayah hinterland nya.

Berbagai isu nasional dan global seperti penanggulangan kemiskinan *(Poverty Reduction)*, peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, serta penjaminan kelestarian lingkungan hidup perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada masalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pringsewu antara lain mencakup; kepadatan penduduk, PDRB Perkapita yang rendah, keterbatasan kesempatan kerja, penataan ruang dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar yang berwawasan tata ruang, struktur perekonomian yang kokoh, peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "*Good Governance and Clean Goverment*", serta kondusifitas lingkungan wilayah dalam bingkai agama dan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang dimiliki dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pesawaran.

Dengan mempertimbangkan bebagai kondisi, permasalahan, potensi, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pesawaran serta selaras dengan moto pemerintah Kabupaten Pesawaran periode 2007-2026 "Andan Jejama" yang merupakan arti kata

dari memelihara atau menjaga dengan baik secara bersama - sama, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2007–2026 adalah "Bersama masyarakat Pesawaran mewujudkan cita – cita luhur, mewujudkan kabupaten pesawaran yang maju, makmur, dan sejahtera", maka Desa Sidomulyo memiliki Visi yaitu "Terwujudnya Pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas demi menuju masyarakat Desa Sidomulyo yang maju, aman dan sejahtera".

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sidomulyo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Sidomulyo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b. Misi

Kabupaten Pesawaran sebagaimana di dalam RPJM Daerah tahun 2007- 2026 memuat misi Kabupaten Pesawaran yaitu :

1) Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai dengan tata ruang wilayah.
2) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
4) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah "*Good Governance and Clean Government*".
5) Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis.

Sedangkan guna mendukung misi tersebut maka Desa Sidomulyo mempunyai misi antara lain:

1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan berpegang pada prinsip-prinsip;
2) Perangi kebodohan dengan mewajibkan pendidikan
3) Mendukung pendirian lembaga pendidikan formal dan nonformal
4) Pelayanan mudah
5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah.
6) Pembangunan merata
7) Pembangunan di sesuaikan dengan kebutuhan
8) Pembangunan di laksanakan di setiap wilayah
9) Pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan dan Mengedepankan partisipasi serta Gotong royong.
10) Menciptakan Lingkungan Desa Sidomulyo yang aman dan kondusif.

Visi Pembangunan harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat berbudaya dan kesejahteraan yang ingin dicapai. "Damai" di harapkan tingkat keamanan yang tinggi, wilayah kondusif, jauh dari tindak anarki dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. "Berbudaya" mengandung maksud masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab serta mandiri berdasarkan falsafah Pancasila. “Kesejahteraan“ terdiri dari dan mengandung maksud Kemajuan Desa, keadilan dan kemakmuran. Desa Sidomulyo berada di Provinsi Lampungn Kabupaten Pesawaran Kecamatan Negerikaton Kode Pos: 35353 Bebatasan dengan :

- Timur : Desa Lumbirejo
- Barat : Desa Roworejo dan Desa Adiluwih
- Selatan : Desa Roworejo
- Utara : Desa Poncokresno

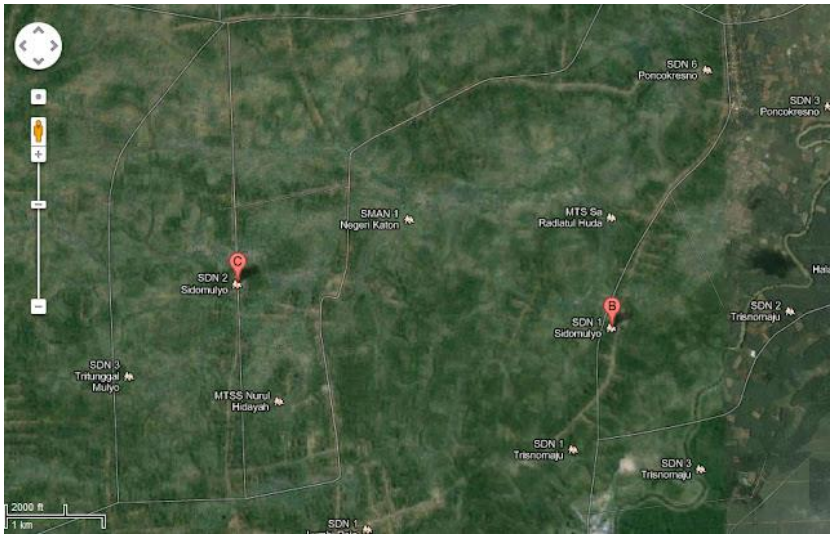

Gambar 4.3 Peta Lokasi Desa Sidomulyo

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidomulyo

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menarik simpulan mengenai strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna di Desa Sidomulyo Tahun 2023. Dan mandiri atau tidak mandiri dalam penanganan dan penyelesaian masalahnya serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Penerapan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Teknlogi Tepat Guna yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Penyadaran atau *(Support*) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta stakeholder yang terlibat dalam program ini berupa pemberian pembekalan dan pelatihan kepada aparatur desa dalam mengoperasikan layanan pemerintah berbasis teknologi tepat guna memang sudah dilakukan secara bertahap terkait pengembangan penerapan trknologi tepat guna pada program Pemberdayaan Masyarakat, namun belum sepenuhnya merata dalam pendampingan tersebut, sehingga masih ada desa yang terkendala di posyantek dan fasilitas teknologi tepat guna sehingga cenderung belum siap menerapkan program ini karena kendala SDM yang masih kurang serta fasilitas dan juga posyantek desa yang belum memadai. Selain itu masih terdapat pemerintah desa yang belum mensosialisasikan program ini ke masyarakat, sehingga antusias dan minat masyarakat terhadap program ini pun masih dirasa kurang. Serta Penyadaran masih disampaikan secara implisit. Meski demikian, masyarakat Desa Sidomulyo masih belum paham terkait pengembangan teknologi tepat guna. Mereka masih beranggapan bahwa pengembangan teknologi tepat guna hanya ditujukan

pada kelompok petani yang membutuhkan. Serta tahap pengakapasitasan, pemanfaatan teknologi tepat guna sejauh ini baru dirasakan oleh bebrapa kelompok tani. Hal ini dibuktikan dari adanya kegiatan pelatihan yang hanya diperuntukkan Publika. Bagi perangkat desa dan pendamping desa, namun tidak untuk masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah memiliki basic pengetahuan di bidangnya masing-masing, seperti pertanian, perikanan dan wirausaha. Oleh karena itu, masyarakat Desa Sidomulyo hanya diberikan fasilitas berupa bantuan alat teknologi tepat guna namun sejauh ini masyarakat belum sepenuh ya merasakan pemanfaatan alat teknologi tepat guna.

2. Tahap Pengkapasitasan (*Capacity)* berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, disimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa kaitannya dengan Pengembangan Teknologi Tepat Guna ini belum sepenuhnya optimal/siap melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna baik dalam hal kompetensi operator desa serta pendanaan. Berkaitan dengan pendanaan sendiri memang cukup membantu (dana stimulan) misalnya dalam hal pengadaan infrastruktur fisik maupun non fisik. Serta tahap pengakapasitasan, pemanfaatan teknologi tepat guna sejauh ini baru dirasakan oleh bebrapa kelompok tani. Hal ini dibuktikan dari adanya kegiatan pelatihan yang hanya diperuntukkan bagi sebagian masyarakat. Hasil dari keseluruhan data yang diperoleh, peneliti menganalisis bahwa pada tahap pengkapasitasan di Desa Sidomulyo belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dibuktikan tidak adanya pelatihan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat desa. Oleh karena itu, masyarakat Desa Sidomulyo hanya diberikan fasilitas berupa bantuan alat teknologi tepat guna namun sejauh ini masyarakat belum sepenuhya merasakan pemanfaatan alat teknologi tepat guna.
3. Pendayagunaan *(Value)* atau nilai berdasarkan hasil penelitian bahwa Desa Sidomulyo belum sepenuhnya menerapkan program pemberdayaan masyarakat ini dengan berbagai faktor penghambat yang sebelumnya telah dijelaskan salah satu contohnya hambatan dalam Penganggaran,

sumber daya manusia akah hal baru teknologi tepat guna serta pos pelayanan teknologi tepat guna (POSYANTEK) Desa Yang membuat program ini terkendala kemudian tidak di rasakan manfaatnya dari pelayanan teknologi tepat guna oleh masyarakat, sedangkan teknologi tepat guna yang seharusnya dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan. Serta pada tahap pendayagunaan, pemanfaatan teknologi tepat guna sudah cukup baik dan sudah di rasakan oleh beberapa masyarakat tani. Namun, untuk fasilitas teknologi sendiri sejauh ini masih dirasakan kurang oleh masyarakat dan juga pos pelayanan teknologi tepat guna yang sampai saat ini belum belum mendukung. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran dan juga kurangnya SDM masyarakat akan hal baru yaitu teknologi tepat guna, Sehingga hasil dari proses kegiatan tersebut kurang memberikan manfaat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa.

6.2 Saran

Penerapan program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Desa Sidomulyo berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan beberapa kendala atau hambatan dalam upaya penerapannya, tentu hal ini memerlukan koordinasi dan pembinaan lebih lanjut dalam hal penyelenggaraan program ini. Sehingga hal ini yang kemudian menjadi evaluasi bagi pihak-pihak terkait agar segera mencari solusi terkait faktor-faktor penghambat program ini, yang pertama adalah pemerintah bekerjasama dengan pihak terkiait agar melaksanakan pemerata dalam pendampingan dan sosialisasi, kemudian BIMTEK terkait kompetensi operator desa dan perlu adanya perhatian lebih terkait peningkatan terhadap fasilitas sarana dan prasarana sehingga program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

1. Pada tahap penyadaran, pemerintah Desa Sidomulyo perlunya memberikan kegiatan penyadaran yang bersifat terang-terangan, seperti

kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dan pendampingan masyarakat. Dari adanya kegitatan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami pemanfaatan teknologi tepat guna.

2. Dan pada tahap pengkapasitasan, pemerintah Desa Sidomulyo perlunya memberikan penguatan kembalipengkapasitasan manusia dan pelatihan kepada masyarakat, seperti Pelatihan dan Pembinaan untuk para Petani, Nelayan, pelaku UMKM, dan lainnya yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi tepat guna tidak hanya dimanfaatkan untuk bantuan saja namun disertai juga dengan adanya pelatihan dan BIMTEK langsung terhadap Masyarakat.
3. Selanjutnya, tahap pengkapasitasan pada tahap ini pemerintah Desa Sidomulyo perlu untuk mengoptimalkan kegiatan yang sudah dilaksanakan setiap tahun melalui keterlibatan masyarakat dan juga harus lebih transparansi dan akuntabel. Serta diberikan dorongan daya, otoritas, dan peluang agar setiap potensi dan kemampuan yang sudah dimiliki oleh setiap kelurahan bisa dimanfaatkan secara lebih luas. Hal ini bertujuan agar masyarakat desa dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah desa serta dapat menilai kesesuaian pemanfaatan teknologi tepat guna dan juga hasil pelaksanaan dilapangan.
4. Selain itu perlunya adanya upaya oleh Dinas PMD Kabupaten Pesawaran, mengajak Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna yang ada dari proses awal hingga akhir kegiatan. Dengan tujuan agar ketidak percayaan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna dan pemerintah desa dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.G, Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik. Pustaka Pelajar.

Abror, Khozin. (2013). Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen. Undergraduate Thesis, Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro.

Antara, G. E. D. (2015). Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Program

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Asmaul Husna, 2018 Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Civic Culture Masyarakat Melayu Palembang: Suatu Kajian tentang Program Palembang EMAS 2018 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bambang, Hariadi. 2003.Strategi Manajemen. Jakarta: Bayumedia Publishing. 2005. Strategi Manajemen. Malang: Bayumedia Publishing

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Memajukan Industri Kreativ di Bali. *Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri*, *9*(3), 182925.

David, F. R. (2010). Manajemen Strategi: Konsep. Jakarta: Salemba Empat edisi 12. David, Fred R. 2011. Strategic Management: Consepts and Cases. Edition 13th Pearson Education

Fadillah, R. (2013). Strategi Pemerintah daerah dalam meningkatkan semangat wirausaha di kelurahan tettikenrarae kecamatan mariorowawo kabupaten soppeng: Skipsi Unismuh Makassar

Hariadi, B. (2005). Perkembangan Praktik Akuntansi Manajemen dan Perubahan Lingkungan Bisnis. *TEMA*, *6*(2), 150-172.

Huraerah, Abu. (2011*). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat.Model Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan..* Bandung. Humaniora.

Indrajit, R. E. (2016). *Electric Government: Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. APTIKOM

J. Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit Grasindo. Jakarta.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government. (2002) . Kementerian Komuniksi dan Informasi.

Laliyo, L. A. (2015). Rekayasa implementasi teknologi tepat guna melalui pengembangan model pembelajaran untuk menumbuhkan budaya pemanfaatan energi terbarukan pada masyarakat daerah terpencil. *Unggulan Perguruan Tinggi (DP2M)*, *2*(1019).

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Nurul Faizah & Sensuse. (2009) . *Faktor-faktor Sukses Implementasi E Government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia. Digital Information & System Conference*

Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo

Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasind

Stephanie & K. Marrus. (2002). Desain Penelitian Manajemen Strategik. Jakarta: Rajawali Press.

Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Alpabeta.

Sugiyono. 2009. Metode. Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suwandi, B. D., & Si, M. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta: PT. *Reneka Cipta*.

Tika, Moh Pabundu. 2005.Metode Penelitian Geografi.Jakarta: Bumi Aksara. WWW,Kamus Bahasa Indonesia.org.Diakses tanggal 30 April.

Visnu, D. S. I. (2014). *Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Swadaya Wanita di Yayasan Sosial Bina Sejahtera Cilacap)* (Doctoral dissertation, UAJY).

Widyasanti, A. (2016). Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Pembuatan Produk Sabun Berbasis Komoditas Lokal di Desa Sindanglaya dan Desa Mekar Wangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis. *Dharmakarya*, *5*(1).

Yanti, E. A. (2019*). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang (*Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Jurnal

Arisaputra, Muhammmad Ilham. (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia.* Jurnal Yuridika. Vol 28. No 2

Al Arif, M., & Rianto, N. (2010). Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang. *Jurnal Asy-Syir'ah*, *44*(2), 813-828.

Cahyono, M. S., Harahap, D. H., & Sukrajap, M. A. (2019). Penerapan teknologi produksi makanan olahan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Bandung. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *3*(1), 21-30.

Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.

Mutmainna, I., Hakim, L., & Saleh, D. (2016). Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 2(3), 268- 283.

Skripsi

Bambang Kurniawan, (2022). “ Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Penerapan *SMART VILLAGE* di Provinsi Lampung Tahun 2021

Nur,Muhammad.(2021)."Faktor Sukses Penerapan E-*Government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa". Skripsi. Makassar. Program Studi Ilmu Pemerintahan

Simamora, Belatahmamero. (2017). "Inovasi Pelayanan Pemerintah Desa Melalui E-*Governmment* (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Panggungharjo,Kecamatan Sewon,Kabupaten Bantul,Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta

Sumber Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESAWARAN 2021 - 2026